

KEBANGKITAN CENDIKIAWAN MUSLIM DALAM PEMIKIRAN DAN PERPOLITIKAN INDONESIA

Syamsuddin Bahrum

Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Langsa

Email: syamlangsa63@gmail.com

Abstrak

Kebangkitan cendikiawan muslim Indonesia diawali lahir sebuah perhimpunan intelektual muslim Indonesia. B.J. Habibie sebagai salah satu cendikiawan menamai perhimpunan ini dengan kata ‘cendikiawan’ dan juga memaknai kata ‘cendikiawan’ sebagai ‘setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial’. Dalam kebangkitan cendikiawan muslim dengan mengedepankan sasaran tunggal 5-K yakni: Kualitas iman dan takwa, Kualitas berpikir, Kualitas berkarya, Kualitas bekerja dan Kualitas hidup. Cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai ‘*political-resource*’ dengan melahirkan partai-partai dan bergabung dengan partai baik partai berlabel Islam maupun nasionalis. Pemikiran cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai intelegensi pengetahuan dengan melahirkan kebangkitan Islam kultural, islamisasi birokrasi serta penerapan nilai-nilai politik Islam dalam dinamika perpolitikan Indonesia.

Keywords : Pemikiran, Cendikiawan, Muslim, Politik

Pendahuluan

Dalam wikipedia, Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai salah satu cendikiawan muslim Indonesia yang dilahirkan di Parepare Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga meninggal pada umur 83 tahun di Jakarta tanggal 11 September 2019. Kontribusi besar B.J. Habibie kepada Republik Indonesia pasca mundurnya Suharto

sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mengembalikan dan mendapatkan dukungan kembali dari Dana Moneter International dan negara-negara donor untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian Republik Indonesia. B.J. Habibie juga melaksanakan amanah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui

UU Otonomi Daerah, B.J. Habibie berhasil merendam gejolak disintegrasi warisan dari Orde Baru hingga dituntaskan pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hadirnya seorang sosok cendekiawan muslim, B.J. Habibie, yang memiliki keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki concern yang tinggi terhadap ‘nasib’ rakyat, seorang ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada waktu itu bagaikan inspirator dan motivator bagi bangsa Indonesia. Tampilnya B.J. Habibie sebagai mantan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia (1970-1980) dan Presiden Republik Indonesia (1997-1999), harus diakui telah memberikan dasar penting pula dalam kehidupan rakyat, terutama umat Islam, dalam menemukan ‘jati dirinya’ sebagai elemen terpenting dan terdepan bagi bangsa Indonesia.¹

Ini adalah cita-cita yang telah lama diidamkan oleh beberapa tokoh muslim untuk mendirikan sebuah

perhimpunan intelektual muslim akhirnya menemukan peluang politiknya yang menguntungkan dalam konteks keperluan Suharto untuk mendapatkan mitra strategis baru sebagai kompensasi atas kemungkinan merosotnya dukungan unsur-unsur militer terhadapnya. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut merupakan sebuah proyek dari mahasiswa, namun simposium intelektual muslim itu segera menjadi peristiwa politik besar bagi elite nasional. Judul simposium itu sendiri mengarisbawahi obsesi wacana dominan saat itu mengenai tahap tinggal landas Indonesia melalui pembangunan IPTEK dan dan SDM, yaitu “Simposium Nasional Cendekiawan Muslim: Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI”.²

Dengan dibuka oleh Presiden Suharto dan dihadiri oleh beberapa menteri dan panglima ABRI, serta para eselon atas birokrasi Orde Baru pada 6 desember 1990, peristiwa tiga hari yang bersejarah itu diikuti oleh lebih dari 500 intelektual muslim dari

¹Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan Dalam Perubahan Sosial*(Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 264

²Yudi Latif, *Geneologi Inteligencia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad XX*(Jakarta: Kencana, 2013), h. 549

berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Pada hari kedua simposium, sekitar 460 peserta undangan membubuhkan tanda tangannya pada piagam pendirian sebuah perhimpunan intelektual yang baru dan memilih B.J. Habibie secara bulat sebagai ketuanya. Namun nama dari perhimpunan tersebut bukanlah Ikatan Sarjana Muslim Indonesia (ISMI) seperti yang diusulkan oleh Madjid, namun Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) seperti yang diusulkan oleh B.J. Habibie dan para intelektual yang lain.

Pergeseran dari istilah ‘sarjana’ ke ‘cendekiawan’ mengindikasikan adanya sebuah peralihan yang radikal dalam politik makna (*the politics of meaning*) dan menghadirkan implikasi-implikasi politik yang sangat berbeda. Jika istilah ‘sarjana’ yang digunakan, maka keanggotaan perhimpunan itu akan terbatas pada pemegang sarjana dan besar kemungkinan akan lebih menekankan keterkaitannya dengan kepentingan-kepentingan akademis. Dengan menggunakan istilah ‘cendekiawan’,

yang didefinisikan B.J. Habibie sebagai “setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial”, keanggotaan perhimpunan itu menjadi terbuka bagi konstituen yang lebih luas dan cakupan aktivitasnya melampaui batas-batas kepentingan akademis.³

Kiprah B.J. Habibie Dalam Kebangkitan Cendekiawan Muslim

Dalam kiprahnya selama 5 tahun pertama dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), B.J. Habibie telah mengatur langkah sistematis sebagai berikut: (1).Membuat Anggaran Dasar yang mencerminkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya; (2).Merekayasa atau membuat wajah ICMI dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia dan dunia Islam pada umumnya; (3).Membuat aproksimasi yang menjamin mekanisme sistem dan mekanisme organisasi ICMI yang kompatibel dengan budaya bangsa

³*Ibid*, h. 549-550

dan nafas agama. Dalam hal ini termasuk menampilkan dengan tepat tokoh Islam yang intelektual dan tokoh intelektual yang islami ke dalam mekanisme organisasi; (4).Pelaksanaan program ICMI yang efektif dan efisien pada hakekatnya didasarkan pada Alquran dan Sunnah yang berorientasi pada suksesnya pembangunan nasional Indonesia sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945; (5).Menyusun dan melaksanakan program yang bisa diterima oleh umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia dalam wujud apa yang disebut 5-K (Kualitas iman dan takwa, Kualitas berpikir, Kualitas berkarya, Kualitas bekerja dan Kualitas hidup).⁴

Kelima butir tersebut telah dilaksanakan B.J. Habibie pada periode Muktamar I dan dikembangkan dalam periode Muktama II. Karena itu, banyak yang mengatakan ICMI identik dengan B.J. Habibie. Tetapi menjelang Muktamar II, ICMI melalui Formatur 45 dengan berdasarkan usulan dari orsat telah tersusun pengurus baru ICMI dengan

personil yang lebih mencerminkan kehendak anggota. Maka, pasca Muktamar II, B.J. Habibie bisa dikatakan lebih banyak berperan dalam mengendalikan organisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa periode pra Muktamar II ia telah berhasil menempatkan diri sebagai pemimpin sebagai yang diharapkan umat.

Penguatan kembali B.J. Habibie ketika itu sebagai Ketua Umum ICMI dalam Muktamar II, menunjukkan bukan hanya cerminan pemberian mandat baru kepadanya untuk memimpin organisasi cendekiawan muslim Indonesia dalam mewujudkan tujuannya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran tunggal 5-K yang tersohor itu. Tetapi disisi lain, ia juga secara langsung merupakan pilihan untuk memberi *endorsement* pada pilihan garis strategis untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan lewat pembangunan nasional dengan

⁴A. Makmur Makka, *The True Life of Habibie: Cerita di Balik*

Kesuksesan(Depok: Pustaka IIMaN, 2008), h. 156

pendekatan seperti yang dimasyarakatkan oleh Habibie.⁵

Di dalam bidang sosial kemasyarakatan pun, kepemimpinan B.J. Habibie semakin melebar. B.J. Habibie bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia, melainkan milik seluruh dunia Islam. Hal ini ditandai dengan terpilihnya B.J. Habibie menjadi Presiden *Islamic International Forum for Science, Technologi and Human Resources Development (IIFTIHAR)*, yaitu forum Islam internasional untuk pembangunan iptek dan sumber daya manusia yang didirikan di Jeddah 2 Juni 1996 dan bermarkas di Jakarta. Forum yang didirikan lewat deklarasi Jeddah oleh enam tokoh Dunia Islam: Ahmad Muhammad Ali (Bank Pembangunan Islam), Abdullah bin Saleh Obeid (Rabithah Alam Islami), Abdullah Musleh (Lembaga Mukjizat Alquran dan Assunnah dalam Iptek), Tawfik Al-Shawai (Federasi Pendidikan Islam Internasional) dan Ahmad Totonji (Lembaga Internasional Pemikiran Islam).

Tampak berdirinya *Islamic International Forum for Science, Technologi and Human Resources Development* tersebut tidak terlepas dari situasi dimana Indonesia sedang giat-giatnya membangun sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lebih jauh bahwa Indonesia selalu dijadikan arahan oleh dunia Islam, maka B.J. Habibie menyambut desakan dari dunia Islam untuk memimpin organisasi tersebut, yang kelahirannya diawali dengan Konferensi Internasional Mukjizat Alquran di Bandung, Jawa Barat atas kerjasama ICMI dengan Liga Muslim se-Dunia dan Lembaga Sunnah dan Mukjizat Alquran tentang Sains dan Teknologi.⁶

Cendikiawan Muslim Indonesia

Lahirnya kaum cendikiawan Muslim baru timbul pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Sebelumnya ‘cendikiawan muslim’ disebut sebagai ‘kaum terpelajar’ atau ‘golongan terpelajar’. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia,

⁵*Ibid*, h. 156-157

⁶*Ibid*, h. 157-158

‘cendikiawan’ memiliki arti: *cerdik, cendekia/pandai, ilmunan, intelektual, jauhari, sarjana, sastrawan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti lebih sedikit mengenai ‘cendikiawan’, yaitu ‘orang cendik pandai; orang cerdas pandai; orang intelek’. KBBI lebih panjang mengurai kata ‘cendikia’: 1) *tajam pikiran, lekas mengerti (kalau diberi tahu sesuatu); cerdas; pandai*; 2) *cepat mengerti situasi dan pandai mencari jalan keluar (pandai menggunakan kesempatan); cerdik; licik*; 3) *terpelajar; cerdik pandai; cerdik cendekia*. Cendikiawan memiliki pemikiran yang luas, keahlian khusus, berpikir sistematis kritis dan memiliki karakter adil dan benar.⁷

Pada dasarnya cendikiawan adalah penafsir jalan hidup manusia. Jika dilihat dalam konteks cendikiawan muslim yaitu seorang yang menempuh pendidikan formal ataupun non formal yang dengan kecendikiawannya mampu melihat, menafsirkan, merespon lingkungan

dengan sikap kritis, kreatif dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif ke-Islaman. Kecendikiawan seseorang dapat dilihat bagaimana pandangannya mengenai kebudayaan, bagaimana mempersoalkan sistem budaya yang ada dan memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan.

Membedakan cendikiawan muslim dengan ulama adalah para pemikir selalu mengalami kegelisahan intelektual dalam mempertanyakan Islam yang normatif dan skriptual tidak lagi mengalirkan pesannya yang mendasar ke dalam zaman yang baru. Sedangkan ulama mempertahankan otoritas keagamaannya. Cendikiawan yang melabelkan dirinya dengan Islam adalah sebuah sikap berpikir Islam, membuka kembali penafsiran Alquran, Al-hadis, tradisi ditengah-tengah kompleksitas dan letak kehidupan manusia yang beragam. Jadi, cendikiawan muslim adalah orang yang hidup dalam iman dan pikirannya yang selalu berjuang

⁷Fridiyanto, *Kaum Intelektual Dalam Catatan Kaki Kekuasaan*(Lampung: Penerbit Gre Publishing, 2017), h. 58

melawan formalisme dan strukturalisme kebaragamaan yang hanya menempatkan ritual sebagai rutinitas.⁸

Kaum cendikiawan muslim tidak memandang perjuang politik praktis merebut kekuasaan sebagai jalan perjuangan. Permasalahan substantif umat Islam adalah transformasi kultural yang dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, perbaikan ekonomi, pengembangan masyarakat desa, perbaikan kesehatan dan program strategis lainnya. Transformasi kultural ini sangat relevan dengan bazar ide dan budaya yang semakin intens di era teknologi informasi yang mengimpor ideologi dan kebudayaan yang telah merasuki ke celah-celah setiap masyarakat kota dan sampai pedesaan. Cendikiawan muslim harus mampu masuk ke dalam perebutan ruang publik tersebut sebagai orang yang beriman.

Cendikiawan yang memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan tentang masyarakat. Cendikiawan tidak boleh apolitis dan menganggap masuk ke ranah politik seperti

menjadi anggota dewan hal yang tidak layak bagi cendikiawan. Dunia politik, dalam hal ini parlemen akan meningkat kinerja dan citranya jika kaum cendikiawan dapat mewujudkan apa yang selalu dibayangkan baginya ideal dan selalu dikritiknya terhadap sebuah permasalahan. Cendikiawan dituntut untuk mewujudkan apa yang diwacanakannya dan membuat terobosan-terobosan memperbaiki aturan main yang berlaku. Cendikiawan harus plus politik, yang memiliki sikap politik dalam hidupnya, misalnya berupa pernyataan ‘membela rakyat’ dan tempat yang konkrit membela rakyat adalah menjadi anggota parlemen.⁹

Cendikiawan Muslim adalah dua kata yang dipilih oleh Orde Baru untuk menyatukan kaum intelektual Muslim dalam sebuah lembaga Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Namun pada tahun 1995-an ICMI mengalami gejolak, karena beberapa anggota ICMI memandang ICMI telah disalah gunakan dan tidak dianggap pancasilais dan nasionalis.

⁸*Ibid*, h. 58-59

⁹*Ibid*, h. 59-60

Sehingga perlu dibentuk sebuah wadah yang universal dan dibentuklah ‘Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP)’.

Beberapa faktor pendirian lembaga yang dianggap menyatukan intelektual Muslim; *Pertama*, kebangkitan sosio-kultural Islam. Pendirian ICMI merupakan simbol transformasi struktural masyarakat muslim melalui peningkatan jumlah kelas menengah Muslim yang mencerminkan peningkatan standar ekonomi dan strata sosial yang artinya merupakan ‘*political-resource*’ yang tidak bisa diabaikan Orde Baru. *Kedua*, sebagai proses Islamisasi pemerintahan dan birokrasi. *Ketiga*, pemerintah mendukung ICMI dikarenakan keinginan untuk mengontrol Islam. Orde Baru berharap akan dapat mempergunakan Islam untuk mempertahankan *status quo*. *Keempat*, sebagai wujud untuk realisasi dan implementasi nilai-nilai politik Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan keempat ini tidak disetujui oleh Orde Baru karena akan menganggu stabilitas nasional, ICMI

harus didasarkan pada Pancasila. Pendirian ICMI tidak hanya merefleksikan kematangan intelektual Islam namun merupakan upaya untuk memberi warna dalam diskursus politik nasional. Keanggotaan ICMI terdiri dari beragam profesi, latar belakang politik dan ideologi. ICMI menampilkan modernisme Islam yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah Indonesia dengan cara rasional dan pendekatan ajaran Islam.¹⁰

Cendekiawan Muslim Dalam Perpolitikan Indonesia

Setelah terjadi perubahan sosial dan politik yang berlangsung sejak akhir 1980-an, sebagian cendekiawan muslim mulai mempertimbangkan pentingnya peran kepartaian, kendati belum mampu merefleksikan esensi partai sebagaimana di negara-negara demokratis, namun telah membuka ruang bagi keterlibatan cendekiawan dalam proses pengambilan kebijakan. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada akhir

¹⁰*Ibid*, h. 60-61

1990 merupakan manifestasi dari kegelisahan cendekiawan muslim terhadap peran cendekiawan dalam pentas politik dan kekuasaan. Lahirnya ICMI pada satu sisi menunjukkan adanya ruang artikulasi cendekiawan dalam arena politik yang tengah mengalami perubahan – khususnya sikap positif pemerintah (Sorharto) terhadap Islam dan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk memperluas basis atau legitimasi kekuasaannya, tetapi pada sisi lain, membuka ruang bagi proses “Islamisasi Birokrasi” atau istilah “santrinisasi priayi” dan priayisasi santi”.¹¹

Para cendekiawan muslim mulai membangun hubungan mutualistik dengan partai penguasa, yaitu Golkar, sejak pemilu 1992, banyak cendekiawan muslim yang berhasil menjadi anggota DPR RI mewakili Golkar, termasuk Din Syamsuddin yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, Din sejak lahir 1980-an telah menjadi anggota aktif Golkar, beberapa cendekiawan lainnya aktif dalam partai penguasa

tersebut. Cendekiawan muslim lainnya tetap bersikap kritis terhadap penguasa, baik cendekiawan muslim yang menyetujui berdirinya ICMI maupun mereka yang menentang kelahiran ICMI. Kalangan dalam ICMI yang secara terbuka mengkritik pemerintah khususnya korupsi dan kebijakan politik yang tidak memihak rakyat seperti pada kasus Freeport dan kasus Busang Kaltim adalah Amien Rais (Ketua Dewan Pakar ICMI dan Ketua Umum Muhammadiyah sama itu), bahkan oleh sebagian kalangan Amien Rais, masih ada Adi Sasono, Nurcholis Madjid, Syafii Maarif, Dawam Rahardjo dan lain-lain yang tetap menunjukkan sikap independensi kecendekiawaan, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik, ketidakadilan dan praktik politik yang menyimpang.

Transmisi cendekiawan muslim dalam politik berlangsung masif setelah kejatuhan Orde Baru, berdiri berbagai partai politik dengan beragam motif dan kepentingan, beragam isu dan agenda serta sebagian mengusung ideologi

¹¹Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan*

Aksi Sosial(Jakarta: Kencana, 2010), h. 201-202

keagamaan dalam perjuangan politiknya. Fenomena kemunculan para cendekiawan dalam politik praktis ini dapat dipahami dalam konteks perubahan politik, terutama keinginan mereka untuk mengisi pos-pos kekuasaan yang dianggap potensial bagi perbaikan dan perubahan sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum negara.¹²

Manifestasi dari kegiatan politik para cendekiawan ditunjukkan dengan berbagai kegiatan yang merefleksikan ide-ide dan gagasan politik yang dirumuskan pada level partai. Sebagian besar partai-partai yang menggunakan Islam sebagai asas perjuangan politiknya adalah berdirinya atas prakarsa cendekiawan muslim. Lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB) atas prakarsa Dr. Anwar Haryono, MA yang didukung oleh cendekiawan muslim yang lebih muda, tujuannya bagaimana cita-cita perjuangan masyumi dahulu dilanjutkan melalui PBB. Partai ini semula diharapkan akan dipimpin oleh Prof. Dr. Amien Rais, MA

(tokoh reformasi 1998) sebagai ketua umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai sekretaris jenderal, namun dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan tersendiri, Amien Rais menolak tawaran itu dan mendirikan partai tersendiri yang lebih plural dan bervisi kebangsaan, tanpa menggunakan label agama, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), akhirnya PBB dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra. Cendekiawan muslim terkemuka lainnya yang juga mendirikan partai adalah Prof. Dr. Deliar Noer, yakni Partai Umat Islam (PUI) yang didukung oleh sejumlah cendekiawan yang memiliki ide dan gagasan yang sama mengenai wadah memperjuangkan Islam dalam medan politik praktis. PAN dan PBB pada pemilu 1999 berhasil melewati ambang batas minimal (*electoral threshold*) 2 persen sementara PUI gagal memenuhi ketentuan UU pemilu.

Khusus dalam PAN, banyak cendekiawan muslim bergabung dengan partai yang dibentuk Amien

¹²*Ibid*, h. 202-203

Rais, setidaknya terdapat nama Prof. Dr. Dawam Rahardjo, Prof. Dr. Amin Azis, A.M. Fatwa, Dr. Faisal H. Basri, Abdillah Thoha, Dr. Moeslim Abdurrahman, Dr. Hasballah M. Saad, Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Umar Juoro, Prof. Taufik Abdullah dan masih banyak lagi cendekiawan muslim yang bergabung dengan partai PAN. Pilihan-pilihan para cendekiawan tersebut bergabung dengan PAN tentu didasarkan pada pemikiran rasional bagaimana membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Sementara mereka yang bergabung dengan partai Islam seperti PBB, selain Yusril Ihza Mahendra, lapisan menengah cendekiawan muslim seperti MS. Kaban, Hamdan Zoelva, Prof. Faisal, Sahar L. Hasan dan lain sebagainya.¹³

Cendekiawan muslim yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun tidak sedikit, selain Gus Dus, tentu Dr. Alwi Shihab, Dr. AS. Hikam, Dr. Mahfud MD, Drs. Matori Abdul Jalil, Dra. Khofifah Indar Parawansa, Syaifullah Yusuf, Muhaimin

Iskandar, Ali Masykur Musa dan lain-lain, selain PKB, kalangan NU juga mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU) oleh Yusuf Hasyim (Paman Gus Dus) yang didukung oleh Sholahuddin Wahid (adik Gus Dur) dan Partai Nahdatul Ulama (PNU) dengan tokohnya K.H. Sukron Makmun yang diikuti oleh cendekiawan muslim lapis kedua dan ketiga yang lebih muda dari mereka. Banyaknya cendekiawan muslim lapis atas dan menengah yang terlibat dalam partai merupakan ‘pengulangan’ peristiwa yang sama seperti yang terjadi pada dekade 1950-an. Belum lagi cendekiawan muslim yang telah meniti karier politik melalui Golkar dan PPP, tentu mereka tetap ‘istiqamah’ dalam partai tersebut.

Cendekiawan muslim memasuki sejumlah partai politik sejak masa Orde Baru, seperti Akbar Tandjung (Mantan Ketua Umum PB HMI) menjadi ketua umum Partai Golkar dan diikuti oleh Eky Sjahrudin, Marwah Daud Ibrahim, Prof. Dr. Din Syamsuddin (sejak 2000

¹³*Ibid*, h. 203-204

Din keluar dari Golkar), Prof. Dr. Muladi dan beberapa cendekiawan lapis kedua seperti Hajriyanto Y. Thohari, Dr. Happy Bone Zulkarnaen, Dr. Yudi Crisnandi dan lain-lain. Selain Golkar, cendekiawan muslim banyak di PPP dan juga terdapat di PDI-P seperti Zulfan Lindan (sejak tahun 2004 keluar dari PDI-P dan bergabung dengan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Prof. Dr. Buchari, Harry Ahmadi dan lain-lain.

Salah satu partai politik penting yang perlu dipertimbangkan, baik kemunculannya maupun perkembangannya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini pada awalnya berdirinya bernama Partai Keadilan (PK), setelah mengikuti pemilu 1999, PK hanya memperoleh kursi DPR kurang dari 2 persen yang diisyaratkan oleh UU, maka elit-elit PK mendirikan partai baru, sebagaimana lazimnya para politisi Indonesia yang partainya tidak memenuhi syarat UU, maka dibentuk partai yang dari nama dan lambangnya tidak banyak yang berbeda, demikian pula yang

dilakukan oleh politisi PK. Sejak tahun 2001 dan 2002, PK resmi berubah nama dengan menambah satu kata di belakang PK dengan kata Sejahtera, maka jadilah PKS. Partai ini memperoleh dukungan kalangan cendekiawan muslim lapis menengah atau 'embrio' cendekiawan muslim, karena mereka secara umum masih muda.¹⁴

Pemikiran Cendekiawan Muslim Dalam Perpolitikan Indonesia

Perkembangan baru dalam duni Islam, lahirnya para pemikir cendekiawan muslim yang secara kolektif. Pemikiran cendekiawan muslim ini memiliki perhatian khusus terhadap Islam dan memiliki komitmen terhadap perkembangan dan peningkatan umat Islam. Cendekiawan muslim dengan melahirkan pemikirannya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat melalui pembentukan opini publik sehingga melahirkan perdebatan-perdebatan publik. Para cendekiawan muslim selalu terlibat dalam realitas sosial dan politik

¹⁴*Ibid*, h. 204-205

masyarakat kontemporer dengan ide dan gagasannya yang membangun bagi masyarakat dan perpolitikan Indonesia.

Pemikiran cendekiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sangat berpengaruh dan memiliki kecenderungan dominan dalam proses melahirkan sebuah kebijakan. Para cendekiawan muslim yang memiliki komitmen terhadap Islam serta memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu agama Islam. Sehingga dalam kebijakan politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pemikiran ke-Islamannya dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam proses pengambilan politik memunculkan beberapa pemikiran yang didominasi sesuai dengan latar belakang dari cendekiawan muslim tersebut, beberapa pemikiran cendekiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia, diantaranya adalah:

1. Kebangkitan Islam Kultural

Di Indonesia, semenjak tahun 1970-an sampai tahun 1990-an,

wacana keagamaan telah berkembang menuju wacana kultural. Islam di Indonesia tidak luput dari dinamika pemikiran dan pergerakan pembaruan. Antusiasme kalangan intelektual Islam dalam wacana pemikiran Islam kultural begitu tinggi sehingga sering disebut sebagai masa ‘antusiasisme intelektual’ untuk membedakan dengan ‘antusiasisme politik’ sebagaimana terjadi pada masa-masa tertentu. Kalangan Islam kultural Indonesia mulai menempatkan suatu hubungan yang harmonis antara cita-cita Islam dan fenomena tradisi masyarakat yang pluralitas. Aspirasi-aspirasi keagamaan yang dikemukakan para intelektual aktivis muslim Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda.¹⁵

Hal ini disebabkan perbedaan pengalaman, pola pemikiran, realitas yang dihadapi dan perbedaan dalam memahami pesan-pesan wahyu. Namun demikian, secara umum corak pemikiran yang dialektis menjadi penekanan utama para pemikir pembaru di Indonesia, yang terkait

¹⁵Syamsul Bakri dan Mudhofir, *Jombang-Kairo, Jombang-Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur Dalam*

Pembaruan Islam di Indonesia (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 10-11

dengan pengumpulan pemikiran Islam dengan persoalan sumber-sumber normatif agama, persoalan modernitas maupun perjumpaan Islam dengan persoalan kebangsaan, kenegaraan dan budaya lokal. Pada dekade ini, para intelektual aktivis muslim Indonesia mulai memikirkan bagaimana agam Islam dapat memberikan kontribusi sekaligus menjadi bagian dari modern Indonesia. Munculnya para pemikir Islam, telah memberikan sumbangan intelektual yang besar, baik dalam rangka memahami respons agama terhadap arus modernisasi maupun dalam mengembangkan tradisi kritis di lingkungan intelektual Islam, khususnya di kalangan ilmuwan, mahasiswa dan dosen.

Kebangkitan Islam kultural di Indonesia juga ditandai dengan pemikiran Islam kosmopolitan atau aliran neomodernisme yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Sementara itu, M. Dawam Rahardja, M. Amin Rais, A. Syafi'i Ma'arif dan Kuntowijoyo termasuk kategori pemikir Islam yang memunculkan gagasan Islam alternatif, yaitu

menjadikan Islam sebagai jalan alternatif dalam merespons dinamika modernitas sehingga diperlukan gerakan Islamisasi dengan jalan menemukan warisan asli Islam untuk menyusun sistem-sistem ke-Islaman. Para intelektual aktivis ini diakui oleh para pemikir sesudahnya sebagai intelektual yang memiliki kepedulian yang besar pada problematika umat Islam Indonesia dan segenap anak bangsa. Kontribusi yang diberikan dapat dipahami dalam kerangka upayanya melakukan transformasi ke arah pemikiran Islam kontemporer untuk mempertemukan Islam dengan modernisasi, *nation state* dan budaya sendiri melalui dialog. Akan tetapi, di antara intelektual aktivis Indonesia ini terdapat perbedaan isu-isu khas yang dikembangkan, seperti isu Abdurrahman Wahid tentang pribumisasi Islam, sementara Nurcholish Madjid mengembangkan sekularisasi, disamping bersama Kuntowijoyo juga mengembangkan

Islam peradaban (teologi pembangunan).¹⁶

Berbeda dengan pemikiran pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid dan sekularisasi Nurcholish Madjid, M. Amin Rais justru menganjurkan dilakukannya upaya Islamisasi ilmu pengetahuan, re-Islamisasi bangsa Indonesia, demokrasi Islam dan rekonstruksi sistem zakat menuju terciptanya keadilan sosial. Sedangkan A. Syafi'i Ma'arif lebih menekankan pada gagasan 'membumikan Islam'. Teori sosial profetis yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo dan Islam alternatif Jalaluddin Rakhmat turut mewarnai kebangkitan dan pembaruan pemikiran Islam Indonesia. Sedangkan dibidang hukum, Munawir Sadzali lebih berbicara tentang reaktualisasi Islam mengingat dinamika historis sudah berkembang begitu cepat disamping adanya prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang harus dikedepankan.

Selain para pemikir muslim tersebut di atas, masih banyak

intelektual aktivis Islam Indonesia yang berperan aktif dalam transformasi masyarakat Islam Indonesia menuju Indonesia baru. Nama-nama seperti Johan Effendi, Ahmad Wahid, Abdul Munir Mul Khan, Muslim Abdurrahman, Masdar F. Mas'udi, Said Aqiel Siraj, Musa Asy'arie, Azyumardi Azra dan Ulil Abshar Abdallah adalah sebagian dari intelektual aktivis yang berperan aktif dalam transformasi masyarakat Islam Indonesia dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang lebih luas. Peran aktif dari para aktivis pergerakan Islam juga ikut mewarnai suasana kebangkitan Islam di Indonesia.¹⁷

Dalam konteks ke-Indonesia, Islam sebagai sebuah agama yang secara sosiologis dianut oleh mayoritas masyarakat tidak luput dari pergumulan dengan modernitas sehingga perlu kontekstualisasi nilai-nilai Islam secara kultural. Dengan sendirinya, proses perumusan kembali orientasi kehidupan dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam ini akan menyebabkan adanya hubungan

¹⁶*Ibid*, h. 11-12

¹⁷*Ibid*, h. 12

saling memengaruhi antara Islam dan modernitas itu sendiri sehingga terjadi akulturasi budaya. Pembaruan mesti bersifat terbuka terhadap gagasan yang datang dari luar. Adaptasi terhadap arus modernisasi bagi muslim harus dilakukan dengan daya nalar yang kritis sehingga akar-akar kepribadian dan kultur yang bertumpu pada nilai Islam tetap dapat hidup subur dalam proses transformasi menuju masyarakat Islam kontemporer. Masyarakat Islam dapat membangun dan melakukan adaptasi terhadap modernitas dengan polanya sendiri tanpa harus meninggalkan kultur keagamaannya.

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas Indonesia memang seharusnya dapat memberikan sahamnya secara lebih riil karena sebagaimana yang diungkap oleh Weber bahwa agama memiliki kekuatan untuk membantu menyingkap makna dunia. Oleh karena itu, dalam konteks Islam diperlukan pemikiran dan pergerakan yang dimotori oleh para intelektual aktivis Islam untuk meletakkan basis-

basis kesadaran baru bagi masyarakat agar mampu menjawab tantangan modernitas dan globalisasi yang melingkupinya. Disinilah makna penting Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam konstelasi pemikiran Islam di Indonesia. Peranan mereka dalam mewujudkan wajah Islam yang lebih cair, kosmopolitan dan pluralistik telah mengubah paradigma-paradigma berpikir dogmatis dan selanjutnya mengarahkannya ke teologi inklusif.¹⁸

2. Islamisasi Birokrasi

Sejak akhir tahun 1990-an, sikap akomodatif pemerintah terhadap umat Islam telah mengubah sikap politik umat Islam, dari sikap politik Islam resistensi menjadi sikap politik akomodatif. Oleh karena itu, pada tahun-tahun tersebut dikatakan sebagai masa ‘bulan madu’ antara umat Islam dan pemerintahan orde baru. Suasana ‘bulan madu’ ini ditandai dengan munculnya ‘islamisasi birokrasi’ dan juga banyaknya kebijakan pemerintah

¹⁸*Ibid*, h. 14-15

yang mengakomodir politik umat Islam, seperti pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (1988), pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama (1989), Sekber Mendagri dan Menag tentang Penanganan Zakat 'Bazis' (1991), lahirnya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang kebolehan memakai jilbab bagi siswi di sekolah, serta berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1990).¹⁹

Meskipun ICMI bukan organisasi politik, ia memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi tumbuh suburnya Islam politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses islamisasi MPR pada hasil pemilu 1992 dan *penghijauan* kabinet Soeharto pada 1993. Semua ini merupakan hasil dari gerakan politik ICMI. Sejak saat itu, terjadi gerakan islamisasi besar-besaran di dalam tubuh birokrasi Indonesia. Golongan kelas menengah yang selama muncul secara malu-malu dan takut menunjukkan identitas ke-

Islamannya, dengan serta merta menampakkan diri sebagai muslim yang taat melalui simbol-simbol dan ritus-ritus keagamaan: meningkatnya kegiatan shalat berjamaah di kantor-kantor, pendirian majelis taklim di semua instansi dan jumlah pejabat yang pergi haji. Proses islamisasi ini tidak hanya terjadi pada kalangan birokrat, tetapi juga di tubuh militer sehingga muncul istilah militer hijau, untuk membedakannya dari kelompok militer abangan atau nasionalis yang dikenal sebagai militer merah putih.²⁰

Untuk mengamankan keberlangsungan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kelompok Islam memiliki peluang untuk bangkit dan mendapat posisi strategis dalam pemerintahan adalah mereka yang memiliki kesamaan atau paling tidak kemiripan ideologi dengan pemerintah, yakni Islam kelas menengah modernis. Sementara gerakan Islam tradisional tetap saja tidak memperoleh tempat yang berarti dalam era kebangkitan

¹⁹Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 25-26

²⁰Al-Zastrow Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 80-81

Islam tersebut, mereka tetap saja berada di pinggiran. Proses bangkitnya Islam simbolik ini menjadi semakin leluasa seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 yang disusul dengan hadirnya era reformasi.²¹

Bentuk paling fenomenal dari akomodasi infrastruktural ini adalah keinginan negara untuk tidak hanya mengizinkan, melainkan juga membantu pendirian sebuah bank Islam, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 1991. Seperti masalah masalah jilbab dan hukum pengadilan agama, gagasan bank Islam, yang diperkenal untuk pertama kali 1973, pernah dirasakan sebagai sesuatu yang melekat pada kontroversi negara Islam. Dapat dimengerti, dengan situasi hubungan politik antara Islam dan negara saat itu, gagasan bank Islam tidak dapat direalisasikan dengan segera. Kini, karena pandangan bahwa Islam merupakan ancaman ideologis terhadap negara sudah semakin memudar, tidak ada alasan apapun

bagi negara untuk menghalangi didirikannya bank semacam itu.²²

Sejak awal, gagasan didirikannya bank Islam didorong oleh motif-motif agama dan ekonomi. Secara keagamaan, bank Islam dimaksudkan sebagai lembaga finansial alternatif bagi mereka yang karena keyakinan keagamaannya, tidak ingin berhubungan atau melakukan transaksi finansial dengan bank-bank komersial umum yang menawarkan dan meminta bunga, karena mereka menganggap bunga sebagai salah satu bentuk dari ribâ yang dilarang dalam Islam. Terlepas dari kontroversi yang masih berlangsung tentang apakah bunga itu termasuk ribâ atau bukan, kenyataan bahwa sejumlah kaum Muslim memandanya demikian mengharuskan didirikannya bank yang bebas bunga semacam itu.

Secara ekonomis, bank Islam dirancang untuk membantu mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber ekonomi kaum Muslim Indonesia. Lebih khusus lagi,

²¹*Ibid*, h. 81

²²Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik*

Politik Islam di Indonesia(Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 358

bank Islam dimaksudkan untuk membuka kesempatan-kesempatan bisnis baru dengan berperan sebagai investor, bukan sebagai kreditor atau pemberi pinjaman. Dengan beroperasi antara lain dibawah mekanisme bagi hasil (*mudhârabah*), BMI benar-benar dapat menginvestasikan modalnya kepada para pengusaha Muslim yang secara umum tidak mampu memperoleh jaminan pinjaman dari bank-bank komersial lain karena kurangnya jaminan (material) yang dibutuhkan.²³

3. Penerapan Nilai-nilai Politik Islam

Meskipun bukan negara Islam, namun Indonesia bisa menjadi model bagi hubungan antara Islam dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di satu sisi dan kebangsaan modern disisi lain. Hal ini berangkat dari pemahaman dasar bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah meletakkan moralitas didalam tata kemasyarakatan, yang kemudian dilegalkan menjadi hukum Islam.

Moralitas inilah yang menjadi dasar praktik politik Islam di negeri berpenduduk mayoritas muslim ini. Titik berangkat dari peran Islam di dalam politik dan kenegaraan Indonesia ialah kesadaran akan kemajemukan Bangsa. Maka jika mendirikan Negara Islam akan menciderai perawatan atas kemajemukan tersebut, maka umat Islam *mainstream* memilih jalur substantif di dalam penerapan nilai-nilai politik Islamnya. Hal ini bisa dinilai sebagai pengorbanan, namun juga kesadaran untuk merawat kemajemukan sebagai realitas yang telah Tuhan ciptakan.²⁴

Secara garis besar, hubungan Islam dan negara di Indonesia melampui ekstrim politik yang menjadi pemicu benturan antara dunia Islam dan Barat. Yakni ekstrim fundamentalisme yang memperjuangkan negara agama, serta ekstrim sekulerisme yang memisahkan agama dari negara. Berdasarkan dasar negara Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan Yang

²³*Ibid*, h. 359

²⁴Syaiful Arif, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai-Nilai Ke-*

Indonesiaan(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 193

Maha Esa sebagai sila pertama, Indonesia menegakkan suatu ‘negara ketuhanan’ tanpa terjebak menjadi negara agama. Prinsip ketuhanan Pancasila juga menjadi konstitusional bagi peran agama di ruang politik, tentu secara progresif.

Untuk memahami hubungan unik ini, diperlukan pemahaman atas khasanah politik di dalam Islam, baik yang terjadi di realitas historisnya maupun pergerakan pemikiran dan politik umat Islam di masa modern. Pemetaan atas tradisi politik didalam Islam akan memahamkan kita tentang prinsip-prinsip politik yang telah diletakkan Nabi Muhammad s.a.w. terutama dimasa ‘negara madinah’. Dari prinsip-prinsip yang bersifat moralis, tetapi juga politis (pembentukan masyarakat) ini, kita bisa mengetahui, mengapa umta Islam di Indonesia bisa memperjuangkan nilai-nilai melalui bangunan bangsa-bangsa (*nation-state*).²⁵

Strategi kultural lebih menitikberatkan kepada bagaimana

sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Islam secara kultur dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa harus secara formal melegitimasi dengan simbol Islam secara fulgar. Pendekatan ini lebih bersifat inklusif dan siap berdialog dengan berbagai ideologi yang berbeda sekalipun. Dalam transformasi sosial, telah terjadi diversifikasi makna politik Islam. Pendukung madzhab transformasi sosial ini mengajak umat Islam untuk: (1).Memahami makna politik secara luas dalam pengertian yang sebenarnya mencakup program, strategi dan wilayah perjuangan; (2).Merumuskan hubungan secara substantif lebih signifikan antara kekuatan politik Islam dengan negara serta lembaga-lembaga sosial politik yang ada; dan (3).Merumuskan kembali tujuan-tujuan politik Islam yang lebih bersifat inklusif.²⁶

Kesimpulan

Kebangkitan cendekiawan muslim Indonesia awalnya dari pemikiran B.J. Habibie pada

²⁵*Ibid*, h. 193-194

²⁶Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan*

Sosial(Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 182

penamaan sebuah perhimpunan intelektual muslim Indonesia awalnya didasarkan pada kata ‘sarjana’ yang diusulkan oleh Madjid. Namun, B.J. Habibie mempunyai pemikiran dengan kata ‘cendikiawan’ dikarenakan istilah ‘cendikiawan’ memaknai sebagai “setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial”. Dengan lahirnya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) wujud cita-cita beberapa tokoh muslim Indonesia mendirikan sebuah wadah untuk beramal, berkreasi, berkomunikasi dan berprestasi guna mengangkat harkat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sebagai pengabdian kepada Allah s.w.t.

Kebangkitan cendikiawan muslim dengan menjalankan ICMI melalui kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran tunggal 5-K yaitu: Kualitas iman dan takwa, Kualitas berpikir, Kualitas berkarya, Kualitas bekerja dan Kualitas hidup. Sehingga kepemimpinan B.J. Habibie semakin melebar. B.J. Habibie bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia,

melainkan milik seluruh dunia Islam. Hal ini ditandai dengan terpilihnya B.J. Habibie menjadi Presiden *Islamic International Forum for Science, Technology and Human Resources Development (IIFTIHAR)*, yaitu forum Islam internasional untuk pembangunan iptek dan sumber daya manusia yang didirikan di Jeddah 2 Juni 1996 dan bemarkas di Jakarta.

Cendikiawan muslim merupakan berasal dari dua kata dengan tujuan untuk menyatukan intelektual-intelektual Muslim dalam sebuah lembaga yakni Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Dikarenakan cendikiawan dikenal dengan kaum terpelajar atau golongan terpelajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cendikiawan, adalah orang cendik pandai, orang cerdas pandai, orang intelek. Jadi, cendikiawan muslim merupakan seseorang yang menempuh pendidikan formal ataupun non formal yang dengan kecendikiawannya mampu melihat, menafsirkan, merespon lingkungan dengan sikap kritis, kreatif dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif ke-Islaman.

Cendekiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia dengan membangun hubungan mutualistik dengan partai penguasa, yaitu Golkar, sejak pemilu 1992, banyak cendekiawan muslim yang berhasil menjadi anggota DPR RI mewakili Golkar. Kemudian cendekiawan muslim melakukan manifestasi dari kegiatan politik para cendekiawan ditunjukkan dengan berbagai kegiatan yang merefleksikan ide-ide dan gagasan politik yang dirumuskan pada level partai yaitu dengan melahirkan partai-partai baru baik yang berlabel Islam maupun nasionalisme.

Pemikiran cendekiawan muslim ini memiliki perhatian khusus terhadap Islam dan memiliki komitmen terhadap perkembangan dan peningkatan umat Islam. Cendekiawan muslim dengan melahirkan pemikirannya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat melalui pembentukan opini publik sehingga melahirkan perdebatan-perdebatan publik. Pemikiran cendekiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sangat berpengaruh dan memiliki

kecenderungan dominan dalam proses melahirkan sebuah kebijakan. Para cendekiawan muslim yang memiliki komitmen terhadap Islam serta memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu agama Islam dengan melahirkan kebangkitan Islam kultural, islamisasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Arif, Syaiful, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai-Nilai Ke-Indonesiaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018
- Bakri, Syamsul dan Mudhofir, *Jombang-Kairo, Jombang-Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur Dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2004
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, 2011
- Fridiyanto, *Kaum Intelektual Dalam Catatan Kaki Kekuasaan*, Lampung: Penerbit Gre Publishing, 2017
- Idi, Abdullah, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan Dalam Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Julijanto, Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Latif, Yudi, *Geneologi Inteligensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX*, Jakarta: Kencana, 2013
- Makka, A. Makmur, *The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan*, Depok: Pustaka IIMaN, 2008
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*, Yogyakarta: LKiS, 2010

